



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Dalam penyusunan laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran realisasi dan capaian kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan Perlindungan Sosial dengan tugas pokok dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Purbalingga, 2 Pebruari 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. PATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landaan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah	4
1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Visi dan Misi... ..	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	15
3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja	17
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.4. Analisis Program/Kegiatan	35
3.5. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Tahun 2023.....	48
4.2. Beberapa permasalahan / hambatan.....	49
4.3. Strategi yang Diperlukan	50
Lampiran-Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Lain-lain	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2023	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2023	7
Tabel 1.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi per 31 Desember 2023	7 – 8
Tabel 1.4 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Dinpendukcapil Kabupaten Tahun 2023	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2023	16
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 s/d 2023	18
Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1	20
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1	20
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2	21
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3	23
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019 - 2023	25
Tabel 3.9 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran	39
Tabel 3.11 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan Kinerja ini adalah

- Inventarisasi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan;
- Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku pelaksana dan pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indikator sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Selanjutnya LAKIP Dinpendukcapil yang telah dibuat merupakan Capaian Kinerja dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor : 42 Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diKabupaten/Kota.
10. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 87 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga. (pakai aturan baru)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah

1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan,

pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b. Penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- e. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 87 tahun 2016

tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menurut tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2.1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

2.2. Seksi Identitas Penduduk

3. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Seksi Kelahiran dan Kematian,

3.2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

4.1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinpendukcapil per 31 Desember Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS/P3K		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SD	1	-	1	-	2	2,9
2	SMP Sederajat	-	-	1		1	1,5
3	SMA Sederajat	1	2	14	7	24	54,4
4	D3	1	1	6	-	8	8,8

No	Tingkat Pendidikan	PNS/P3K		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
5	S1	8	6	13	8	35	29,4
6	S2	2	2	-	-	4	2,9
	Jumlah	13	11	35	15	74	100%

Kondisi pegawai Dinpendukcapil pada tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah ASN dan Non ASN Dinpendukcapil sebanyak 74 orang yang terdiri 26 PNS/P3K (35,14 %) dan 48 THL (64,86 %). Dari jumlah 74 orang tersebut untuk pns dan non pns yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 21 orang (28,38 %), kemudian yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 35 orang (51,35%), berpendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 8 orang (10,81%), SMP sebanyak 1 orang (1,3 %) dan SD sebanyak 2 orang (2,56 %). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah berpendidikan sarjana (S1).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinpendukcapil per 31 Desember Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan I	1	-	1	3,8
2	Golongan II	1	2	3	11,54
3	Golongan III	10	7	17	65,38
4	Golongan IV	3	2	5	19,23
	Jumlah total			26	100

1.5.2. Kondisi Sarana dan Prasarana (Asset)

Mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
per 31 Desember 2023

No	Nama barang	Jumlah	Baik	Rusak
1	Mobil	6 Unit	5	1
2	Motor	18 Unit	17	1
3	Server	3 Unit	3	-

4	Tv smart	2 Unit	2	-
5	Scanner	5 Unit	2	3
6	Pc Komputer	42 Unit	37	5
7	Laptop	19 Unit	16	3
8	Printer E-KTP	10 Unit	6	4
9	Printer	40 Unit	33	7
10	Printer KIA	6 Unit	5	1
11	AC	14 Unit	7	7
12	Kipas angin	5 Unit	5	-
13	Mesin ketik	2 Unit	2	-
14	Telepon	2 Unit	1	1
15	Mesin antrian	2 Unit	1	1
16	Speker / pengeras suara	4 Unit	4	-
17	Mesin absensi	1 Unit	1	-
18	Alat rekam KTPel	30 Unit	25	5
19	Tablet	4 Unit	3	1
20	Rak besi arsip	20 Unit	19	1
21	Rak kayu	8 Unit	8	-
22	filling kabinet	6 Unit	6	-
23	Brankas	1 Unit	1	-
24	Rak surat kabar	1 Unit	1	-
25	Kursi Pelayanan	20 Unit	15	5
26	Papan informasi	6 Unit	4	2
27	Meja office panjang	2 Unit	2	-
28	Area Bermain anak	1 Unit	1	-
29	Meja Kerja	37 Unit	35	2
30	Kursi kerja roda	13 Unit	13	-
31	Kursi Futura	60 Unit	50	10
32	Genset	1 Unit	1	-
33	SmartPhone/HP	2 Unit	2	-
34	LCD Projector	2 Unit	2	-

35	Rak Taman Baca	1 Unit	1	-
36	UPS Merek Eaton 9e	1 Unit	1	-

Kondisi sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih cukup memadai, namun dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perlu dilakukan peremajaan khususnya untuk kursi pelayanan, kursi rapat, AC dan alat perekaman di kecamatan. Hal tersebut mengingat sarana prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat.

4. Daftar Aset yang dikelola.

Aset yang dikelola Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sampai periode tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan Instalasi, Berdasarkan input data pada SimAset tahun 2023 rekapitulasi asset 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

No	NAMA ASET	Nilai tahun 2023 (dlnm rupiah)		KET
		AWAL	AKHIR	
1	Tanah	1.480.857.000	1.480.857.000	
2	Peralatan dan Mesin	4.898.953.145	5.301.786.145	
3	Gedung dan Bangunan	7.808.113.500	7.808.113.500	Mutasi dr Dinas PU
4	Jaringan dan Instalasi	43.521.455	43.521.455	
	Akumulasi penyusutan	4.867.891.320,25	5.375.784.174,13	
	Jumlah	9.365.452.779,75	9.258.493.925,87	

Sumber : rekonsiliasi asset Dinpendukcapil 2023

Tabel 1.1 jumlah total nilai asset tetap Dinpendukcapil Purbalingga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.258.493.925,87,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan

dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan

6. tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
8. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga masuk dalam misi yang ke- 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tujuan

Adapun capaian kinerja tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Purbalingga adalah

1. Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk d pencatatan sipil

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan indikator kinerja utama perubahan yang telah ditetapkan, dalam Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Purbalingga Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	90.06
2.		1. Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	72,41
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	84.5

		3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran penduduk :	Persen	82.75
			1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	99.22
			2. Kepemilikan KTP	Persen	99.02
			3. Kepemilikan KIA	persen	50
			Cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil :	Persen	96
			1. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	Persen	97
			2. Buku Pokok Pemakaman	Persen	75
			3. Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100
			4. Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100
			5. Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100
			6. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100
			7. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	Persen	100
No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.535.905.000,00	Rp. 4.328.842..393	95,44	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.207.043.000,00	Rp. 1.204.301.213	99,77	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 87.112.000,00	Rp. 87.107.300	99,99	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 246.156.000,00	Rp. 246.151.281	100,00	
	Jumlah Total :	Rp. 6.076.216.000,00	Rp. 5.866.402.187	96,55	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Dalam bab ini juga kriteria pencapaian sasaran maupun indikator, diuraikan dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Tinggi	

76 ≤ 90	Baik	
66 ≤ 75	Cukup	
51 ≤ 65	Sedang	
≤50	Kurang	

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1.	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	89,38	89,55	100,20
	Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi Sakip Dinkendukcapil	Nilai SAKIP Dinkendukcapil	Nilai	72,41	72,41	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	84,5	87,38	103.41
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari:	Persen	82,75	82,65	99,88

		a. Kepemilikan KK	Persen	99,22	99,84	100,62
		b. Kepemilikan KTP	Persen	99,02	98,23	99,20
		c. Kepemilikan KIA	Persen	50	49,87	99,74
		Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terdiri dari :	Persen	96	96,44	100,46
		a. Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	97	97,10	100,10
		b. Buku Pokok Pemakaman	Persen	75	78	104
		c. Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	100
		b. Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100	100	100
		c. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	Persen	100	100	100

3.2. Analisis dan Evaluasi kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN :

“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

Untuk tahun 2023, hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan indicator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,20% dari target sebesar 89,38 % realisasi sebesar 89,55 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” selama 5 (lima) tahun dari 2019 -2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Tujuan tahun 2019 s/d 2023

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target akhir
Rata-rata capaian kinerja	Persen	97,95	98,74	86,57	89,85	89,38	89,55	100,20	95,50

Capaian kinerja tujuan adalah persentase penjumlahan dari dokumen pendaftaran penduduk dan dokumen pencatatan sipil dibagi dua. Adapun realisasi capaian kinerja tujuan dari mulai tahun 2019 sd 2023 mengalami fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan dan kendala yaitu

1. Masih kurangnya sosialisasi dan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai ke desa-desa terpencil yang jauh dari kecamatan maupun dinas
2. Sarana prasarana pencetakan KTP dan KIA belum dilaksanakan di kecamatan, masih di dinas sehingga terjadi penumpukan antrian.
3. Ketersediaan blangko KTP yang masih terbatas.

Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi pelayanan baik dengan desa maupun kecamatan yang menjadi tujuan pelayanan sehingga diharapkan sosialisasi maupun pelayanan jemput bola bisa maksimal.

Untuk menunjang kinerja tujuan dimaksud perlu dilakukan yaitu :

1. Melakukan inovasi pelayanan agar target kinerja pelayanan dapat lebih meningkat.
2. Prosedur pelayanan yang lebih sederhana.

SASARAN 1 .

“ Meningkatkan implementasi Sakip Dinpendukcapiil “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan implementasi Sakip Dinpendukcapiil “ dengan 1 (satu) indikator nilai Sakip Dinpendukcapiil, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan implementasi Sakip Dinpendukcapiil “disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Dinpendukcapiil Sakip	Nilai	72,41	72,41	100

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah predikat yang diberikan oleh Inpektorat Purbalingga atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Predikat AKIP adalah hasil penilaian Inspektorat atas LKjIP perangkat daerah tahun Y-1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan indicator kinerja “Nilai Sakip Dinpendukcapiil “ memperoleh nilai 72,41 (predikat “BB”). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai

kinerja, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target akhir
Rata-rata capaian kinerja	Nilai	NA	NA	65,16	72,41	72,41	72,41	100	77

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi untuk indikator kinerja sasaran 1 yang dilaksanakan mulai tahun 2021 memperoleh nilai 65,16 atau predikat “B” dan pada tahun 2022 mengalami trend peningkatan dengan memperoleh nilai 72,41 atau predikat “BB”. Sedangkan realisasi Nilai Sakip pada tahun 2023 masih sama dengan realisasi tahun 2022 karena tahun 2023 belum dilakukan evaluasi.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran 1 adalah

- Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di OPD.
- Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga belum berdampak pada akuntabilitas OPD.
- Masih belum tersosialisasikannya ke OPD tentang perubahan indikator kinerja.

Strategi kedepan yang dilakukan yaitu

- Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis tentang penerapan akuntabilitas kinerja masing-masing OPD yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga lebih meningkat kualitas implementasi AKIP OPD.
- Perbaiki kualitas implementasi SAKIP.

Sebagai langkah upaya meningkatkan nilai Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berikut matrik rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2023 sebagai berikut :

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Google drive dokumen bukti
Komponen Perencanaan Kinerja					
1	Menyusun indikator kinerja sub kegiatan pada Perjanjian Kinerja Esselon IV sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Menyusun Indikator Kinerja sampai dengan sub kegiatan pada Perjanjian Kinerja Eselon IV untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Kepala Dinas	Sudah dilaksanakan untuk penyusunan PK Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
2	Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Membandingkan dan mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan target yang tercantum dalam rencana aksi baik capaian kualitatif maupun kuantitatif per tribulan	Kepala Dinas	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
3	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil rapatnya	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja per triwulan, membuat notulen dan mendokumentasikan rapat, serta membuat target dan pengukuran atas rekomendasi hasil rapat	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
4	Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib	Mensosialisasikan untuk mengisi ekinerja setiap hari kepada seluruh pegawai secara	Sekdin, Kasubag Umum dan	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing

		tertib	Kepegawaian		BieqOvvn?usp=sharing
Komponen Pengukuran Kinerja					
1	Memastikan agar atasan Langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya	Mengatur jadwal rutin untuk melakukan evaluasi kinerja antara atasan langsung dengan pegawai bawahannya	Sekretaris Dinas	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
2	Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Memberikan sosialisasi kepada pegawai terkait aplikasi yang tersedia dan mendorong penggunaannya untuk pengukuran dan pengumpulan data kinerja	Sekdin, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
3	Meningkatkan Kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program, kegiatan, dan pengukuran Capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/ kebijakan/ aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja	Memasukan pembahasan terkait hambatan atau kendala yang dihadapi serta rekomendasi penyesuaian strategi untuk mengatasi hambatan yang ada dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi tribulanan	Sekretaris Dinas	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
4	Memastikan Rekomendasi-rekomendasi hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan, pengukuran Capaian	Pejabat yang berwenang memangku kegiatan diharapkan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi hasil Rapat Monev untuk kemudian	Sekretaris Dinas	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing

	kinerja triwulanan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik	akan dievaluasi di Rapat Money selanjutnya			
5	Memastikan Seluruh Pegawai Menyampaikan Laporan Capaian Kinerjanya (pada e-kinerja) tepat waktu	Mendorong pengisian laporan capaian kinerja pegawai pada e-kinerja tepat waktu	Sekretaris Dinas, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
Komponen Pelaporan kinerja					
1	Mencantumkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Mencantumkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Segera dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
2	Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya	Menggunakan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan sebagai dasar penyusunan strategi/kebijakan capaian kinerja tahun berikutnya	Kepala Dinas	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
3	Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh Informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab	Melakukan himbauan di setiap apel pagi kepada seluruh pegawai bahwa setiap pegawai memiliki tanggungjawab untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Kepala Dinas	Sudah dilaksanakan pada apel pembinaan setiap hari Senin	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing

	seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan				
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	Meningkatkan Kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal	Mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar	Sekretaris Dinas	Belum pernah ada pelatihan/sosialisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
2	Menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Menggunakan Rencana Aksi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target pada rencana aksi dan capaian kinerja triwulanan secara rutin dan baik	Sekretaris Dinas	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing
3	Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan	Mempersiapkan rapat monitoring dan evaluasi secara baik dengan mempersiapkan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing pemangku kegiatan untuk kemudian dapat dibahas secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi upaya yang	Sekretaris Dinas	Sudah dilaksanakan tapi belum optimal	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing

	implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi - rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala	dibutuhkan untuk mengatasi isu tsb dalam kegiatan rapat monitoring dan evaluasi. Setiap pembahasan baik permasalahan dan hasil rapatnya dibuat notulen dan didokumentasikan serta akan kembali di evaluasi di rapat monev selanjutnya			
4	Menyusun Laporan/Matrik pelaksanaan tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat yang berisikan Daftar Rekomendasi, Rencana Aksi Tindaklanjutnya, Penanggungjawab, dan Status/ Progres penyelesaian rekomendasi	Menyusun laporan/matrik pelaksanaan tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	Sekretaris Dinas dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sudah dilaksanakan	https://drive.google.com/drive/folders/1n6dAQJrnYIDD1KsXw4Wrmm3ZBieqOvvn?usp=sharing

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Hasil evaluasi capaian sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 103.41 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	84,5	87,38	103,41

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai indeks kepuasan yang dicapai oleh perangkat daerah melalui survey kepada para pemohon yang telah dilayani dokumen administrasi kependudukannya. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari rata-rata SKM tribulan I sd tribulan IV Tahun 2023. Realisasi capaian IKM Tahun 2023 sebesar 103,41 %. Realisasi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang sebesar 102,22%

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target akhir
Rata-rata capaian kinerja	Nilai	NA	NA	80,10	85,83	84,5	87,38	103,41	89

Survey Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Purbalingga dilaksanakan tiap tribulan.

1. Tribulan I : Januari – Maret
2. Tribulan II : April – Juni
3. Tribulan III : Juli – September
4. Tribulan IV : Oktober – Desember

Hasil IKM Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021 s.d 2023 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena :

1. Standar Pelayanan yang setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian, efektifitas dan efisiensi dari 14 Komponen yang ada didalam SP.
2. Standar Operasional Prosedur juga setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian, efektifitas dan efisiensinya.
3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan petugas pelayanan dan Bimtek Service Of Excellent/Peningkatan Kapasitas SDM.
4. Dilaksanakannya perbaikan serta pembaruan dari sarana prasarana di seluruh fasilitas pelayanan publik baik yang ada diluar maupun dalam gedung
5. Tersedianya kanal penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang aktif melayani pengguna layanan
6. Setiap tahun secara rutin mendapat evaluasi dari Kemenpan-RB melalui Pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dan Ombudsman RI melalui Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan.

Sasaran 3 : “Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”

Hasil evaluasi capaian sasaran 3 “Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” ” dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
 - 1) Kepemilikan KK
 - 2) Kepemilikan KTP
 - 3) Kepemilikan KIA
2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil

- 1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun
- 2) Buku Pokok Pemakaman
- 3) Kepemilikan akta Kematian
- 4) Kepemilikan akta perkawinan
- 5) Kepemilikan akta perceraian
- 6) Kepemilikan akta pengesahan anak
- 7) Kepemilikan akta pengakuan anak

Mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,17%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	82,75	82,65	99,88
	1) Kepemilikan KK	Persen	99,22	99,84	100,62
	2) Kepemilikan KTP	Persen	99,02	98,23	99,20
	3) Kepemilikan KIA	Persen	50	49,87	99,74
2.	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	96	96,44	100,46
	1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 th	Persen	97	97,10	100,10
	2) Buku Pokok Pemakaman	Persen	75	78	104
	3) Kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100
	4) Kepemilikan akta perkawinan	Persen	100	100	100
	5) Kepemilikan akta perceraian	Persen	100	100	100
	6) Kepemilikan akta pengesahan anak	Persen	100	100	100

7)	Kepemilikan akta pengakuan anak	Persen	100	100	100
----	---------------------------------	--------	-----	-----	-----

Dari tabel diatas pengukuran indikator kinerja sasaran 3 ada 2 (dua) indikator. Untuk indikator cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk mendapatkan capaian sebesar 99,88 % meliputi 3 (tiga) sub indikator :

- 1) Kepemilikan Kartu Keluarga, dengan target kinerja sebesar 99,22 % realisasi sebesar 99,84 % dengan capaian kinerja sebesar 100,62 %
- 2) Kepemilikan KTP, dari target kinerja sebesar 99,02 % realisasi sebesar 98,23 % dengan capaian kinerja sebesar 99,20 %
- 3) Kepemilikan KIA, dari target kinerja sebesar 50 % realisasi sebesar 49,87 % dengan capaian kinerja sebesar 99,74 %

Sedangkan untuk Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil mendapatkan capaian angka sebesar 100,46%. Pengukuran indikator kepemilikan dokumen pencatatan sipil ini terdiri atas 7 (tujuh) sub indikator yaitu :

- 1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun, dari target kinerja sebesar 97 % realisasi sebesar 97,1 % dengan capaian kinerja sebesar 100,10 %
- 2) Buku Pokok Pemakaman, dari target kinerja sebesar 75 % realisasi sebesar 78 % dengan capaian kinerja sebesar 104 %
- 3) Kepemilikan akta kematian, dari target kinerja sebesar 100 % realisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- 4) Kepemilikan akta perkawinan, dengan target kinerja sebesar 100% realisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- 5) Kepemilikan akta perceraian, dengan target kinerja sebesar 100 % realisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %
- 6) Kepemilikan akta pengesahan anak, dengan target kinerja sebesar 100 % realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 % (tercapai)
- 7) Kepemilikan akta pengakuan anak, dengan target kinerja sebesar 100 % adapun realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 %

Dari penjelasan tabel diatas, disimpulkan bahwa sasaran strategis 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan 2 (dua) sub indikator, dari target kinerja sebesar 89,38 % realisasi sebesar 89,55 % dengan capaian kinerja 100.20 %.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2019		Th. 2020		Th 2021		Th 2022		Th. 2023	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Sasaran 3.1 : Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	99,13	102,19	99,10	101,12	81,68	109,82	80,30	100,79	82,65	99,88
	Sasaran 3.2 : Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	96,77	98,77	98,37	100,52	91,46	99,59	99,40	107,31	96,44	100.46

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sasaran 3 dari tahun 2019 - 2023 pada indikator sasaran strategis 3 (tiga) ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, capaian kinerja dari tahun 2019 sd 2023 mengalami trend penurunan. Khusus capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 0,91 % dibanding tahun 2022 dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,79 %., Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang antusias dan tingkat kesadaran dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah.
- b. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, capaian kinerja dari tahun 2019 sd 2023, mengalami kenaikan mulai tahun 2019 sd 2020 sebesar 1,75%. Dan capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan 0,91 %. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7,72 %. Walaupun capaian kinerja sebesar 100,46 % pada tahun 2023 turun sebesar 6,85 % dari tahun 2022.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan Jebol (Jemput Bola) ke desa-desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga
2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online dapat menggunakan aplikasi geogle.form.
3. Penambahan sarana dan prasarana penunjang alat perekaman dan pencetakan baik di dinas maupun di kecamatan
4. Sosialisasi pelayanan baik offline maupun online secara intensif kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan penerbitan dokumen kependudukan.
5. Ketersediaan hibah blangko KTPel dari pusat.

6. Adanya inovasi “Anak Ceria JIPAT” untuk meningkatkan pelayanan yang bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah maupun swasta serta puskesmas di wilayah Kabupaten Purbalingga.
7. Adanya respon penggunaan hak akses dari OPD
8. Adanya kemudahan persyaratan sesuai peraturan
9. Adanya kelancaran jaringan internet
10. Adanya peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang pelayanan prima kepada masyarakat
11. Adanya semangat dan disiplin para ASN dalam bekerja.

7 (tujuh) inovasi sebagai solusi alternative yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja antara lain adalah :

1. Mendoan gratis, melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat cepat, efisien dan gratis dengan bermalam di Balai Desa yang jauh dari pusat layanan kecamatan dan kantor Dinpendukcapil Purbalingga .
2. Dukcapil Siap, melayani perekaman KTPel bagi lansia dan difabel di tingkat desa se Kabupaten Purbalingga
3. Methuk Bocil, jemput bola desa se Kabupaten Purbalingga khusus layanan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 – 17 th kurang 1 (satu) hari.
4. ElKIA POS, layanan pengahntaran dokumen KIA dan KTPel.
5. Anak Ceria JIPAT, layanan terintegrasi dengan rumah sakit, rumah sakit bersalin dan puskesmas dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran
6. Pak PURNA, layanan KTP bagi para pegawai purna tugas dengan kerjasama BKPPD.

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	89,37	89,55	100,20	6.076.216.000	5.866.402.187	96,55	3,65
	Sasaran 1: Meningkatkan implementasi SAKIP Dinpendukcapil	72,41	72,41	100	4.535.905.000	4.328.842.393	95,44	4,56
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan public	84,5	87,38	103,41	1.540.311.000	1.537.559.794	99,92	3,49
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	82,75	82,65	99,88	1.294.155.000	1.291.408.513	99,79	0,09

Analisis Efisiensi pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 sebagai berikut :

Penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2023, untuk mencapai 1 Tujuan dan 3 Sasaran telah dianggarkan sebesar Rp. 6.076.216.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.866.402.187,- atau 96,55 %.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran serta penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 5.866.402.187,- dari anggaran sebesar Rp. 6.076.216.000,- atau 96,55%. Realisasi Keuangan sebesar 96,55 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan 100,20 %, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 209.813.813,- sehingga persentase kinerja keuangan pasca efisiensi adalah sebesar 96,55% dan diketahui terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 3,65 % dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja sasaran 1 dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran 1 “Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil” dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.328.842.393,- dari anggaran sebesar Rp. 4.535.905.000,- atau 95,44 %.

Realisasi keuangan sebesar 95,44 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 100 %, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 4,56 % dalam mencapai sasaran 1 tersebut.

3. Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja sasaran 2 dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat

dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.537.559.794,- dari anggaran sebesar Rp. 1.540.311.000,- atau 99,92 %. Realisasi keuangan sebesar 99,92 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 103,41%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 3,49 % dalam mencapai sasaran 2 tersebut.

4. Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja sasaran 3 dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.291.408.513,- dari anggaran sebesar Rp. 1.294.155.000,- atau 99,79 % dari target. Realisasi keuangan sebesar 99,79 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 99,88 %, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 0,09 % dalam mencapai sasaran 3 tersebut.

3.4. Analisis Program / Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023, Dinas Kependudukan didukung dengan 4 program dan 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja program yaitu :
 - a. Persentase ketersediaan laporan capaian
 - b. Persentase temuan pengelolaan
 - c. Persentase ketersediaan layanan
 - d. Persentase pengelolaan administrasi asset
 - e. Persentase pengadaan barang milik daerah

f. Persentase pemeliharaan barang milik daerah

6 indikator kinerja program diatas dengan target 100 %, terealisasi 95,44% sehingga capaian kinerjanya 95,44 %. Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indicator kinerja persentase ketersediaan laporan capaian adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- realisasi sebesar Rp.1.499.300,- (99.95%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja Th 2024, RKA, RKAP, DPA, DPPA.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.980.000,- (99%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 6 (enam) buah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang terdiri dari LKD, LPPD, LKjIP, SAKIP, LKPJ dan laporan IKM tribulan I sd IV Tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indicator kinerja persentase temuan pengelolaan adalah sebagai berikut :

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud

yaitu terealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.922.098.000,- realisasi sebesar Rp. 2.757.321.350,- (94,36%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya 27 (dua puluh tujuh) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, Alokasi anggaran sebesar Rp.42.430.000,- realisasi sebesar Rp.42.331.157,- (99,77%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 45 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu Terealisasinya honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.41.866.000,- realisasi sebesar Rp.38.992.700,- (93,14%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 21 dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan layanan adalah sebagai berikut :

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat-alat listrik/penerangan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100 %). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan paket komponen instalasi listrik.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan bakar pelumas, bahan isi tabung gas, alat tulis kantor, perabot kantor, perlengkapan kantor, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- realisasi sebesar Rp.25.346.550,- (99,40%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan logistik kantor.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya langganan surat kabar dan majalah. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.264.900,- (94,37%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 dokumen bahan bacaan dan per undang2 an.

d) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor dan makanan minuman jamuan tamu. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.999.925,- (100%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan kunjungan tamu.

e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya makanan dan minuman . Alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- realisasi sebesar Rp.8.997.500,- (99,97%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan rapat koordinasi.

f) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor, bahan computer dan honorarium tim pelaksana kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.600.000,- realisasi sebesar Rp.6.596.900,- (99,95%). Realisasi capaian kinerja dari sub

kegiatan ini adalah 12 laporan SPBE.

- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya materai. Alokasi anggaran sebesar Rp.520.000,- realisasi sebesar Rp.370.500,- (71,25%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan jasa surat menyurat.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya biaya langganan PDAM, listrik dan internet untuk 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp.125.300.000,- realisasi sebesar Rp.103.435.080,- (82,55%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan telpon.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, jasa tata rias dan perjalanan dinas dalam kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.800.000,- realisasi sebesar Rp.5.790.000,- (99,83%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.099.264.000,- realisasi sebesar Rp.1.082.314.025,- (98,46%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan jasa pelayanan umum kantor.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan administrasi aset adalah sebagai berikut :

- 5) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya honorarium pengadaan barang / jasa, honor jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- realisasi sebesar RP.5.996.800,- (99,95 %). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak STNK, dan perizinan kendaraan dinas operasional untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Alokasi anggaran sebesar Rp.164.627.000,- realisasi sebesar Rp.164.626.700,- (100%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 18 unit kendaraan dinas yang dipelihara.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya pemeliharaan komputer, printer, AC, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.48.000.000,- realisasi sebesar Rp. 47.979.006- (99,96%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 15 unit computer dan printer dinas .
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan; dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya

gedung kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi sebesar Rp.22.000.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah 12 unit sarana dan prasarana gedung kantor Dinpendukcapil.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan tersebut tidak lain karena dukungan dan komitmen seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun kendala/tantangan dalam pencapaian program dimaksud yakni :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia karena ASN yang purna tugas maupun tenaga non ASN yang diterima PPPK di kabupaten lain.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana alat perekaman maupun pencetakan KTP.

2. Program Pendaftaran Penduduk, kegiatan dan sub kegiatan meliputi :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a) Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi KTP-EL, KK, KIA. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.207.043.000,- realisasi sebesar Rp.1.204.301.213,- (99,77%). Realisasi capaian kinerja dari program pendaftaran penduduk ini adalah

- Kepemilikan Kartu Keluarga, dari target sebesar 99,22 % realisasi sebesar 99,84% atau 100,62 % (terlampaui)
- Kepemilikan KTP, dari target sebesar 99,02 % realisasinya sebesar 98,23 % atau 99,20 % (tidak tercapai)
- Kepemilikan KIA, dari target sebesar 50% realisasi sebesar

49,87% atau 49,87 % Adapun realisasi capaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk ini adalah jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif, dan dari target sebanyak 153.000 dokumen realisasinya sebanyak 157.722 dokumen atau 103,09 %

Program Pendaftaran Penduduk, tahun 2023, berhasil dilaksanakan. Faktor yang berhasilnya program dimaksud yaitu :

- Tersedianya penambahan SDM IT.
- Tersedianya penambahan sarana dan prasarana
- Terealisasinya penambahan dan dukungan anggaran sosialisasi.
- Sosialisasi melalui medsos, leaflet, banner/baliho.
- Sosialisasi tatap muka langsung kepada masyarakat.

3. Program Pencatatan Sipil

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu meningkatnya pelayanan pencatatan sipil pada Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.87.112.000,- realisasi sebesar Rp.87.107.300,- (99,99%). Adapun target cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil ini sebesar 96 % dan realisasinya sebesar 96,44 % atau 100,10%. Cakupan program pencatatan sipil ini terdiri dari

- Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 th sebesar 97,1% dari target sebesar 97 %
- Buku Pokok Pemakaman sebesar 78 % dari target sebesar 75 %
Kepemilikan akta kematian sebesar 100 % dari target sebesar 100%
- Kepemilikan akta perkawinan sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

- Kepemilikan akta perceraian sebesar 100 % dari target sebesar 100 %
- Kepemilikan akta pengesahan anak sebesar 100 % dari target sebesar 100 %
- Kepemilikan akta pengakuan anak sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

Program Pencatatan Sipil, tahun 2023, berhasil dilaksanakan, hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan dalam hal ini akte kelahiran dan pelayanan pembuatan akte kelahiran masih dilayani di kantor Dinas, belum dapat dilakukan di kecamatan karena terkendala sarana dan prasarana.
- Masih kurangnya partisipasi desa dalam masalah administrasi kependudukan dan masyarakat masih belum mengetahui tentang akta kematian dengan dari desa sudah cukup.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

a) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan administrasi Kependudukan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, langganan internet, pemeliharaan jaringan computer perjalanan dinas , dan belanja modal computer. Alokasi anggaran sebesar Rp.246.156.000,- realisasi sebesar Rp.246.151.281,- (100%). Realisasi capaian dari kegiatan ini adalah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data, dari target PKS sebanyak 15 OPD, realisasinya sebanyak 16 OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan. Kendala/tantangan dalam pencapaian program dimaksud yakni :

- Jaringan SIAK pusat sering mengalami gangguan.
- Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal.
- Belum semua OPD /lembaga menyediakan jaringan tertutup.

3.5 Realisasi Anggaran

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Tujuan Sasaran	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
Sasaran 1: Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	4.535.905.000	4.328.842.393	95.44
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.500.000	3.479.300	99.41
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	3.006.394.000	2.838.645.207	94.42
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	5.996.800	99.95
	4. Administrasi umum perangkat daerah	54.500.000	54.205.775	99.46
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.230.884.000	1.191909.605	96.83
	6. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	234.627.000	234.605.706	99.99

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	1.207.043.000	1.204.301.213	99.77
	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.207.043.000	1.204.301.213	99.77
	Program Pencatatan Sipil	87.112.000	87.107.300	99.99
	1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	87.112.000	87.107.300	99.99
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	246.156.000	246.151.281	100
	1. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	246.156.000	246.151.281	100
	TOTAL	6.076.216.000	5.866.402.187	96.55

Penyerapan atau realisasi anggaran Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan untuk pencapaian kinerja Tujuan sebesar Rp. 5.866.402.187,- dari anggaran sebesar Rp. 6.076.216.00,- atau 96,55 % dari target anggaran.

Tabel 3.11. Analisis Atas Efektivitas Penggunaan Anggaran

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	100,20	5.866.402.187,-	96.55
	Sasaran 1: Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	100	4.328.842.393,-	95.44

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	103,41	1.537.559.794,-	99,92
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Sasaran 3.1 : Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99,88	1.204.301.213,-	99,77
	Sasaran 3.2 : Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100,46	87.107.300	99,99

Capaian kinerja Tujuan didukung oleh 4 program yaitu

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pendaftaran Penduduk
3. Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja Sasaran 1 di dukung oleh 1 program yaitu Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran 1 sebesar Rp. 4.328.842.393,- dari anggaran sebesar Rp. 4.535.905.000,- atau 95,44 % dari target anggaran. Realisasi keuangan sebesar 95,44 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 100 %, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 4,56 % dalam mencapai sasaran 1 tersebut.

Capaian kinerja Sasaran 2 di dukung oleh 3 program yaitu

1. Pendaftaran Penduduk
2. Pencatatan Sipil
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran 2 sebesar Rp. 1.537.559.794,- dari anggaran sebesar Rp. 1.540.311.000,- atau 99,92 % dari target anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,92 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 103,41%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 3,49 % dalam mencapai sasaran 2 tersebut.

Capaian kinerja Sasaran 3 di dukung oleh 2 program yaitu

1. Pendaftaran Penduduk
2. Pencatatan Sipil

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran 3 sebesar Rp. 1.291.408.513,- dari anggaran sebesar Rp. 1.294.155.000,- atau % dari target anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,79 % dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 99,88%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 0,09 % dalam mencapai sasaran 3 tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta sebagai perwujudan good governance. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini, maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rata-rata pencapaian kinerja Tujuan “ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh capaian kinerja sebesar 100,20 %
- b. Rata-rata capaian kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil” dengan indikator nilai sakip Dinpendukcapil memperoleh capaian kinerja 100%.
- c. Rata-rata capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh capaian kinerja sebesar 103,41 %.
- d. Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” dengan 2 (dua) indikator yaitu :
 - Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, memperoleh capaian kinerja sebesar 99,88%.
 - Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, memperoleh capaian kinerja sebesar 100,46%.

- e. Realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar Rp. 5.866.402.187,- dari anggaran sebesar Rp. 6.076.216.000,- atau 96,55 %. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 209.813.13,- atau 3,45%. Adapun realisasi keuangan sebesar 96,55% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan 100,20 %, terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,65 % dalam mencapai tujuan tersebut.

4.2. Beberapa permasalahan /hambatan antara lain:

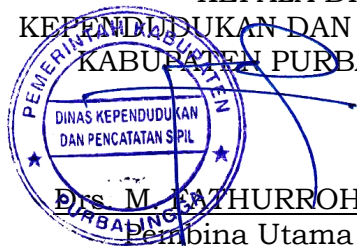
- 1) Masih kurangnya sosialisasi secara masif tentang persyaratan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedangkan pada pengurusannya sendiri tidak dikenai biaya (gratis).
- 3) Belum tercukupinya anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang uptodate dan valid.

4.3. Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Meningkatkan sosialisasi sekaligus pelayanan jemput bola ke desa-desa sehingga capaian kinerja kepemilikan khususnya KTP, KIA dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat terealisasi sesuai target.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi vertikal dan stakeholder terkait untuk capaian IKD.
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan desa tentang akta kematian dan buku pokok pemakaman.

- 4) Optimalisasi sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 5) Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan secara online untuk semua jenis pelayanan administrasi kependudukan.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. KATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.**
Jabatan : BUPATI PURBALINGGA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

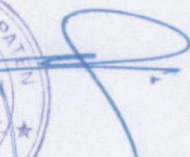
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.


Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	93.04
2.		1. Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	73
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	87.50
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran penduduk : 1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	99.27
			2. Kepemilikan KTP	Persen	99.4
			3. Kepemilikan KIA	persen	60
			Cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil :		
			1. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	Persen	99
			2. Buku Pokok Pemakaman	Persen	100
			3. Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100
			4. Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100
			5. Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100
			6. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100
			7. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 5.082.393.000,00	DAU
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.139.385.000,00	DAU
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 89.112.000,00	DAU
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 274.114.000,00	DAU
Jumlah Total :		Rp. 6.585.004.000,00	

Purbalingga, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.

Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

SUTONO, S.Pd
NIP. 196707 198806 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja

: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.082.393.000,00	DAU

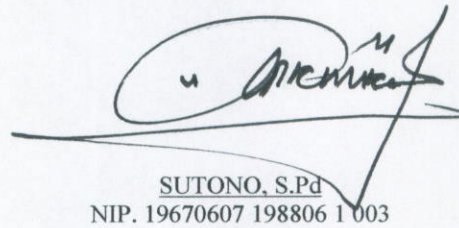
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja

: Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. 1	Sasaran Program 2	Indikator Kinerja 3	Satuan 4	Target 5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk :	Persen	86,22
		1) Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	99,27
		2) Kepemilikan KTP-el	Persen	99,40
		3) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	60

No. 1	Program 2	Anggaran 3	Ket 4
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.139.385.000,00	DAU

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua

Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

Drs. MUGIYARTO, M.Si
NIP. 19670527 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S,Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

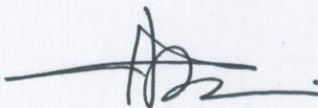
PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua


Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



TRESTI ESTIN HANDAYANI, S,Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil : 1) Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	Persen	99
		Buku Pokok Pemakaman	Persen	100
		Kepemilikan akta kematian	Persen	100
		Kepemilikan akta perkawinan	Persen	100
		Kepemilikan akta perceraian	Persen	100
		Kepemilikan akta Pengesahan anak	Persen	100
		Kepemilikan akta pengakuan anak	Persen	100
No.	Program	Anggaran	Ket	
1	2	3	4	
1.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 89.112.000,00	DAU	

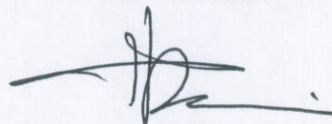
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 196710071993031005

Pihak Pertama



TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 197802242005012013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M. Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

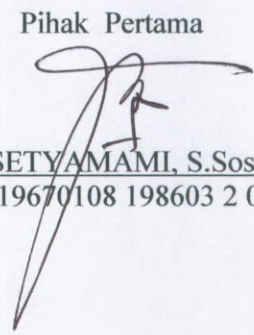
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua

Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja

: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	15

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 274.114.000,00	DAU

Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Pertama

ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUHARTOTO, S.Kom
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : SUTONO, S,Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

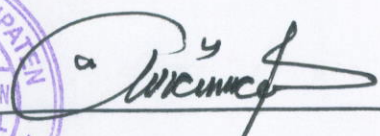
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

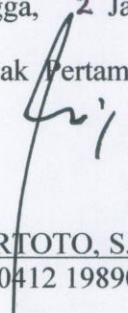
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua

Pihak Pertama




SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003


SUHARTOTO, S.Kom
NIP. 19700412 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

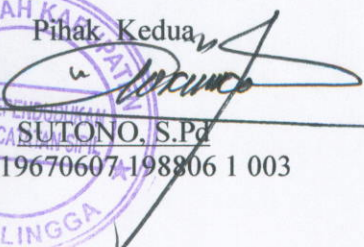
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen	100
-	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8
-	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2
-			Dokumen	6
2.	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100
-	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	27/12
-	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	-Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	30
-	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	-Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	15

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000,00	DAU
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.500.000,00	
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.579.094.000	DAU
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.526.781.000,00	
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 22.430.000,00	
	• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 29.883.000,00	
	Jumlah	Rp. 3.582.594.000,00	

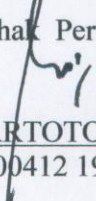
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607-198806 1 003

Pihak Pertama



SUHARTOTO, S.Kom
NIP. 19700412 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DWI NURAENI, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : SUTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

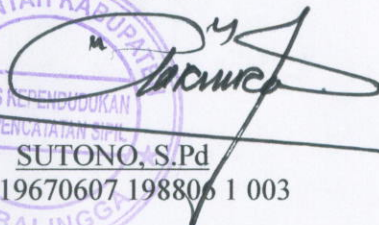
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua


SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003

Pihak Pertama


DWI NURAENI, S.Sos
NIP. 19680725 199203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja

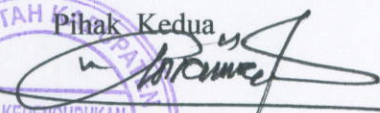
**: Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

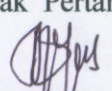
No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah -Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Persentase pengelolaan administrasi aset barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100
		• Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12
2.	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100
		- Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Orang	2
3.	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor -Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor -Tersedianya bahan logistic kantor -Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu -Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD -Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Persen	100
		-Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12
		- Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	12
		-Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan-perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12
		-Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
		- Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12
4.	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat -Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
		•Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
		•Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12
		•Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12

	- Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	• Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dksediakan	laporan	12
5.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
	- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	18
	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12
	- Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	6

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 5.500.000,00	DAU
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,00	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.300.000,00	DAU
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.260.824.000,00	DAU
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 186.175.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.499.799.000,00	

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua

SUTONO, S.Pd
 NIP. 196706071988061003

Pihak Pertama

DWI NURAENI, S.Sos
 NIP. 196807251992032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Kedua

Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

Pihak Pertama

ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004

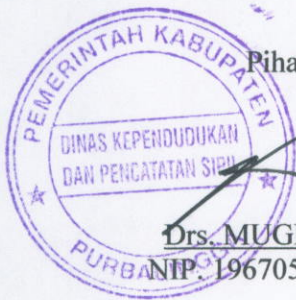
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Meningkatkan jumlah dokumen yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif -Jumlah dokumen yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif -KK -KTPel -KIA	Persen Dokumen	100 158.000 dokumen 67.500 dokumen 69.000 dokumen 21.500 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk • Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	Rp. 1.139.385.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.139.385.000,00	

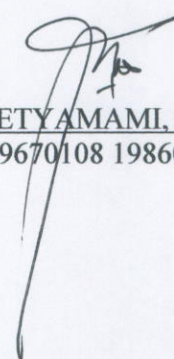
Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Kedua

Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

Pihak Pertama


ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : METHA PRAMANTHA, SE
Jabatan : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

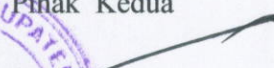
N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

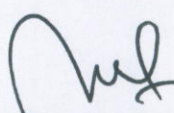
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua

Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

Pihak Pertama

METHA PRAMANTHA, SE.
NIP. 19860515 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Meningkatkan jumlah dokumen yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif -Jumlah dokumen yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif -KK -KTPel -KIA	Persen Dokumen	100 <u>158.000</u> dokumen 67.500 dokumen 69.000 dokumen 21.500 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	Rp. 1.139.385.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.139.385.000,00	

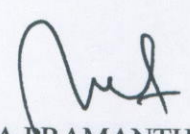
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527/200003 1 001

Pihak Pertama



METHA PRAMANTHA, SE.
NIP. 19860515 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AMINARTI, S.Sos
Jabatan : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Kedua

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

AMINARTI, S.Sos
NIP. 19720130 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Ahli Muda Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil	Persen	100
	-Meningkatnya jumlah dokumen pelayanan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen pelayanan terkait pencatatan sipil -Akta kelahiran usia 0-18 th -BPP -Akta Kematian	Dokumen	<u>32.100 dokumen</u> 25.000 dokumen 239 Laporan 6.801 dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan, peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Rp. 89.112.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 89.112.000,00	

Purbalingga, 2 Januari 2024



Pihak Kedua

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

AMINARTI, S.Sos
NIP. 19720130 199203 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : INDAH SUSRIATIN, S.Sos
Jabatan : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Kedua

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

Indah

INDAH SUSRIATIN, S.Sos
NIP. 19730709 199503 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Ahli Muda Analisis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil	Persen	100
	-Meningkatnya jumlah dokumen pelayanan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil : -Akta Perkawinan -Akta Perceraian -Akta Pengesahan /pengangkatan Anak -Akta Pengakuan Anak	Dokumen	<u>60 dokumen</u> 36 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan, peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Rp. 89.112.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 89.112.000,00	

Purbalingga, 2 Januari 2024.



Pihak Kedua

TRESTLESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

Indah

INDAH SUSRIATIN, S.Sos
NIP. 19730709 199503 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : WASRI PURWATI, S.SOS
Jabatan : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak pertama.

N a m a : ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

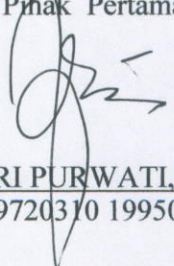
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004

Pihak Pertama



WASRI PURWATI, S.SOS
NIP. 19720310 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Ahli Muda Analis Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan - Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Database OPD	1 Database 15

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 274.114.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 274.114.000,00	

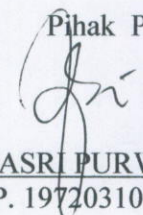
Purbalingga, 2 Januari 2024.

Pihak Kedua



ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004

Pihak Pertama



WASRI PURWATI, S.SOS
NIP. 19720310 199503 2 002

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA**

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				KET.
				2024	TW I	TW II	TW III	
	Tujuan : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	93.04	90.14	90.98	92.09	93.04
	Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	73	--	--	--	73
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	25	25	25	25
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu	Persen	100	25	25	25	25
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Dokumen	2				2
	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	6				6
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	25	25	25	25
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Orang/bln	27	27	27	27	27
	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksana tugas ASN	Dokumen	45	15	10	10	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	21	6	5	5	5
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	25	25	25	25
	Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	Laporan	12	3	3	3	3
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	25	25	25	25

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KET.
				2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Orang	2	1	--	1	--	
4	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum PD	Persen	100	25	25	25	25	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12	3	3	3	3	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	25	25	25	25	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				KET.
				2024	TW I	TW II	TW III	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	3	3	3	3
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	25	25	25	25
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	18	4	4	4	6
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	12	3	3	3	3
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	3	3	3	3
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	87.5	87.75	87.25	87.75	87.50
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	3.1. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	86.22	82.87	83.75	85.17	86.22
		1) Kepemilikan KK	Persen	99,27	99,10	99,15	99,20	99,27
		2) Kepemilikan KTP-el	Persen	99,40	98,50	99,10	99,30	99,40
		3) Kepemilikan KIA	Persen	60	51	53	57	60
		3.2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil :	Persen	99,86	97,41	98,21	99	99,86
		1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 th	Persen	99	97,90	98,50	98,70	99
		2) Buku Pokok Pemakaman (BPP)	Persen	100	84	89	95	100
		3) Kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100	100	100
		4) Kepemilikan akta perkawinan	Persen	100	100	100	100	100

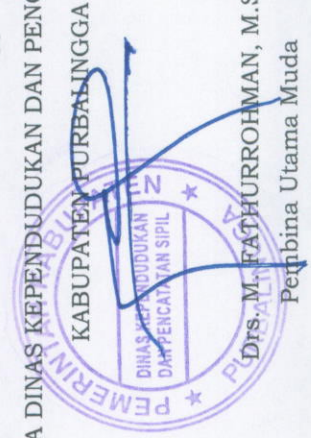
No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KET.
				2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		5) Kepemilikan akte perceraian	Persen	100	100	100	100	100	
		6) kepemilikan akta pengesahan anak	Persen	100	100	100	100	100	
		7) Kepemilikan akta pengakuan anak	Persen	100	100	100	100	100	
II.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	99,27	99,10	99,15	99,20	99,27	
		Cakupan kepemilikan KTP	Persen	99,40	98,50	99,10	99,30	99,40	
		Cakupan kepemilikan KIA	Persen	60	51	53	57	60	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Persen	100	25	25	25	25	
	Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif - Kartu Keluarga (KK) - KTP-el - KIA	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	158.000 67.500 69.000 21.500	39.500 16.875 17.250 5.375	39.500 16.875 17.250 5.375	39.500 16.875 17.250 5.375	39.500 16.875 17.250 5.375	
III.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3.2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil :	Persen	99	97,90	98,50	98,70	99	
		1) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun	Persen	100	84	89	95	100	
		2) Buku Pokok Pemakaman (BPP)	Persen	100	100	100	100	100	
		3) Kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100	100	100	
		4) Kepemilikan akta perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	
		5) Kepemilikan akte perceraian	Persen	100	100	100	100	100	
		6) kepemilikan akta pengesahan anak	Persen	100	100	100	100	100	
		7) Kepemilikan akta pengakuan anak	Persen	100	100	100	100	100	

No.	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				KET.	
				2024	TW I	TW II	TW III		TW IV
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Persen	100	25	25	25	25	
	Sub Kegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif :	Dokumen	32,100	8,025	8,025	8,025	8,025	
		- Akta kelahiran 0-18 th.	Dokumen	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	
		- BPP	Laporan	239	60	60	60	59	
		- Akta kematian	Dokumen	6,801	1,700	1,700	1,700	1,700	
		- Akta perkawinan	Dokumen	36	9	9	9	9	
		- Akta perceraian	Dokumen	0	0	0	0	0	
		- Akta pengesahan/pengangkatan anak	Dokumen	12	3	3	3	3	
		- Akta pengakuan anak	Dokumen	12	3	3	3	3	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	15	12	1	1	1	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi database kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	25	25	25	25	
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	3	3	3	3	

Purbalingga, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

Pejabat Utama Muda

			2) Buku Pokok Pemakaman	Persen	100
			3) Kepemilikan akta Kematian	Persen	100
			4) Kepemilikan akta Perkawinan	Persen	100
			5) Kepemilikan akta Perceraian	Persen	100
			6) Kepemilikan akta pengesahan anak	Persen	100
			7) Kepemilikan akta pengakuan anak	Persen	100
			Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	16

Purbalingga, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	94,75
		1. Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	74
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	88
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	89,64
			1) Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,32
			2) Kepemilikan KTP elektronik	Persen	99,6
			3) Persentase anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	70
			Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil :	Persen	99,93
			1) Kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	99,5

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tahun Anggaran / TW : 2023 / Triwulan I

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Ket.
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPENDUKAPIL	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	72,41	-	-	6,161,479,000	1,007,183,641	16.35
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	-	-			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	-	-			
Jumlah Anggaran Tahun 2023	Rp.	6,161,479,000					
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2023 / TW I	Rp.	1,007,183,641					

Purbalingga, 4 April 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. Fachrurohman, M.Si
NIP. 196710071993031005

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran / TW : 2023 / Triwulan II

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPENDUKCAPIL	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	68.5	-	--	6,161,479,000	2,339,145,494	37.96
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	79.3	--			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	96.5	--			
Jumlah Anggaran Tahun 2023	Rp.	6,161,479,000					
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2023/ TW II	Rp.	2,339,145,494					

Purbalingga, 2 Juni 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. Fathurrohman, M.Si
 NIP. 196710071993031005

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran / TW : 2023 / Triwulan III

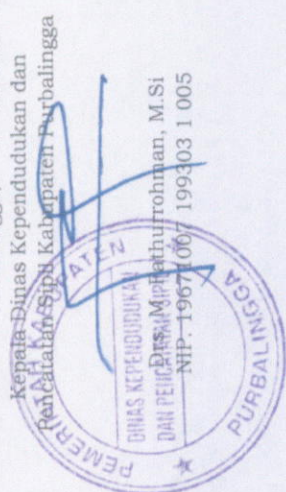
Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi SAKIP Dipenuhi	Nilai SAKIP Dipenuhi	72,41	-	--	6,076,216,000	1,107,463,996	18.23
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	84.5	86.78	102.70			
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari : a. Kepemilikan KK b. Kepemilikan KTP c. Kepemilikan KIA	82.75	81.53	98.53			
		99.22	99.5	100.28			
		99.02	98.1	99.07			
		50	47	88.36			
	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terdiri dari	96	96.01	100.01			
	a. Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Th	97	97.05	100.05			
	b. Buku Pokok Pemakaman	75	75	100			
	c. Kepemilikan akta kematian	100	100	100			

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. kepemilikan akta perkawinan	100	100	100			
	e. kepemilikan akta perceraian	100	100	100			
	f. kepemilikan akta pengesahan anak	100	100	100			
	g. kepemilikan akta pengakuan anak	100	100	100			

Jumlah Anggaran Tahun 2023 Rp. 6,076,216,000

Realisasi Pagu Anggaran Th. 2023/ TW III Rp. 1,107,463,996

Purbalingga, 2 Oktober 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



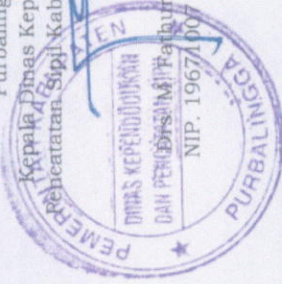
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran / TW : 2023 / Triwulan IV

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	72,41	72,41	100	6,076,216,000	1,412,609,056	23.25
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan	84.5	87.38	103.41			
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari	82.75	82.65	99.88			
	a. Kepemilikan KK	99.22	99.84	100.62			
	b. Kepemilikan KTP	99.02	98.23	99.20			
	c. Kepemilikan KIA	50	49.87	99.74			
	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terdiri dari	96	96.44	100.46			
	a. Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Th	97	97.1	100.10			
	b. Buku Pokok Pemakaman	75	78	104			
	c. Kepemilikan akta kematian	100	100	100			
	d. kepemilikan akta perkawinan	100	100	100			
	e. kepemilikan akta perceraian	100	100	100			

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)			Keterangan
					Rencana	Realisasi	Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	f. kepemilikan akta pengesahan anak	100	100	100				
	g. kepemilikan akta pengakuan anak	100	100	100				
Jumlah Anggaran Tahun 2023		6,076,216,000						
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2023/TW IV Rp.		1,412,609,056						

Purbalingga, 2 Januari 2024

Keppala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Paritawidhyaningrat, M.Si
NIP. 196711071993031005

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM - KEGIATAN/PKPK

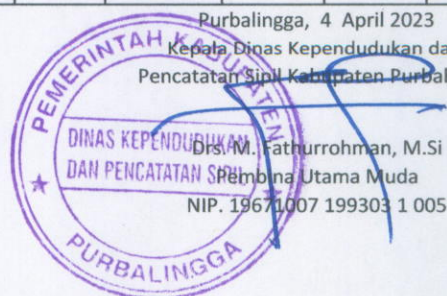
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Kerja Eselon III/IV/Jab Fungsional :
 Tahun Anggaran/ Triwulan : 2023/ TRIBULAN I

No	Nama Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja			
		Pagu	Realisasi	(%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4,628,868,000.00	892,118,209.00	19.27				
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	100	15	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000	320,000.00	9.14				
	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				Dokumen	8	2	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,160,657,000	628,753,828.00	19.89				
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Persen	100	20.00	
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000	-	-				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				Persen	100	20	
6	Administrasi Umum perangkat Daerah	44,000,000	10,721,125.00	24.37				
	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi				Bulan	12	3	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,235,084,000	210,444,556.00	17.04				
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12	3	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,627,000	41,878,700.00	23.31				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	20	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,199,343,000	47,482,290.00	3.96				
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga				Persen	99.22	99.05	
	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik				Persen	99.02	98.99	
	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				Persen	50	47.00	
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1,199,343,000	47,482,290.00	3.96				
	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif				Dokumen	153,000	40,500	26.47
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	87,112,000	15,285,500.00	17.55				
	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian				Persen	72.68		
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	87,112,000	15,285,500.00	17.55				
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				Persen	93.13		
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	246,156,000	52,297,642.00	21.25				
	Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				Persen	96.37		
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	246,156,000	52,297,642.00	21.25				
	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan				Database	1	1	

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 Rp. **6,161,479,000**
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 Rp. **1,007,183,641**

Purbalingga, 4 April 2023
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Drs. M. Fathurrohman, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671007 199303 1 005



PENGUKURAN KINERJA PROGRAM - KEGIATAN/PKPK

Perangkat Daerah

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Unit Kerja Eselon III/IV/Jab Fungsional

:

Tahun Anggaran/ Triwulan

: 2023/ TRIBULAN II

No	Nama Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja			
		Pagu	Realisasi	(%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4,628,868,000.00	1,309,125,628.00	28.28				
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	100	30	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3,500,000	-	-				
	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				Dokumen	8	4	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,160,657,000	957,714,766.00	30.30				
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Persen	100	40.00	
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	6,000,000	2,710,000.00	45.17				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				Persen	100	50	
6	Administrasi Umum perangkat Daerah	44,000,000	9,045,250.00	20.56				
	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi				Bulan	12	6	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1,235,084,000	301,093,112.00	24.38				
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12	6	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	179,627,000	38,562,500.00	21.47				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	25	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,199,343,000	945,642,067.00	78.85				
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga				Persen	99.22	99	
	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik				Persen	99.02	98	
	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				Persen	50	47	
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1,199,343,000	945,642,067.00	78.85				
	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif				Dokumen	153,000	35,000	
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	87,112,000	14,839,000.00	17.03				
	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian				Persen	72.68	--	
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	87,112,000	14,839,000.00	17.03				
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				Persen	93.13		
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN	246,156,000	65,904,299.00	26.77				
	Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				Persen	96.37	--	
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	246,156,000	65,904,299.00	26.77				
	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan				Database	1	1	

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023

Rp.

6,161,479,000

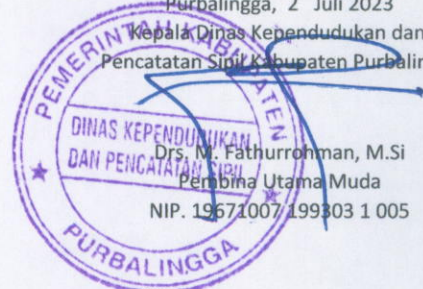
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

Rp.

2,335,510,994

Purbalingga, 2 Juli 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. Fathurrohman, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196710071993031005

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM - KEGIATAN/PKPK

Perangkat Daerah

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Unit Kerja Eselon III/IV/Jab Fungsional

:

Tahun Anggaran/ Triwulan

: 2023/ TRIBULAN III

No	Nama Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja			
		Pagu	Realisasi	(%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4,535,905,000.00	981,994,236.00	21.65				
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	100	72.25	72.25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3,500,000	365,300.00	10.44				
	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				Dokumen	8	4	50
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,006,394,000	621,457,175.00	20.67				
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Persen	100	73.55	73.55
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	6,000,000	-	-				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				Persen	100	60	60
6	Administrasi Umum perangkat Daerah	54,500,000	8,568,400.00	15.72				
	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi				Bulan	12	9	72
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1,230,884,000	296,912,861.00	24.12				
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12	9	66
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	234,627,000	54,690,500.00	23.31				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	70	70
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,207,043,000	57,844,900.00	4.79				
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga				Persen	99.22	99.5	100.28
	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik				Persen	99.02	98.10	99.07
	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				Persen	50	47	88.36
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1,207,043,000	57,844,900.00	4.79				
	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif				Dokumen	153,000	154,500	100.98
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	87,112,000	18,178,000.00	20.87				
	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil				Persen	96	96	100
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	87,112,000	18,178,000.00	20.87				
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				Persen	96	96	100
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN	246,156,000	49,741,360.00	20.21				
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				OPD	15	16	106.67
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	246,156,000	49,741,360.00	20.21				
	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan				Database	1	1	100

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023

Rp.

6,076,216,000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

Rp.

1,107,758,496

Purbalingga, 2 Oktober 2023

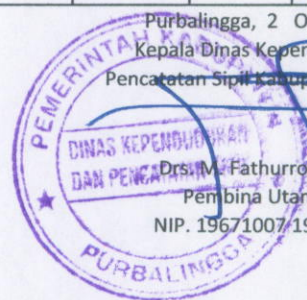
Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Dr. M. Fathurrohman, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196710071993031005




PENGUKURAN KINERJA PROGRAM - KEGIATAN/PKPK

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Kerja Eselon III/IV/Jab Fungsional :
 Tahun Anggaran/ Triwulan : 2023/ TRIBULAN IV

No	Nama Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja			
		Pagu	Realisasi	(%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4,535,905,000.00	1,139,007,420.00	25.11				
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3,500,000	2,794,000.00	79.83				
	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				Dokumen	8	8	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,006,394,000	630,719,438.00	20.98				
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Persen	100	100	100
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	6,000,000	3,286,800.00	54.78				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				Persen	100	100	100
6	Administrasi Umum perangkat Daerah	54,500,000	19,274,100.00	35.37				
	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi				Bulan	12	12	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1,230,884,000	383,459,076.00	31.15				
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12	12	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	234,627,000	99,474,006.00	42.40				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	100	100
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,207,043,000	153,331,956.00	12.70				
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga				Persen	99.22	99.84	100.62
	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik				Persen	99.02	98.23	99.20
	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				Persen	50	49.87	99.74
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1,207,043,000	153,331,956.00	12.70				
	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif				Dokumen	153,000	157,722	103.09
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	87,112,000	38,804,800.00	44.55				
	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian				Persen	96	96.44	100.46
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	87,112,000	38,804,800.00	44.55				
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				Persen	96	96.44	100.46
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN	246,156,000	78,207,980.00	31.77				
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				OPD	15.00	16	106.67
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	246,156,000	78,207,980.00	31.77				
	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan				Database	1	1	100

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 Rp. **6,076,216,000**
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 Rp. **1,409,352,156**

Purbalingga, 2 Januari 2024
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

 Drs. M. Fathurrohman, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671007 199303 1 005

